



Analisis Model Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kaum Muda di Kabupaten Wonosobo

Sahrul Said^{1*}, Dwian Akta Padma Eldo²

^{1,2} Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Sains Al-Qur'an,
Indonesia

sahrulsaid2@gmail.com¹

Alamat: Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 3 Kalibeber, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa
Tengah 56351

Abstract. Political education is a strategic function of political parties in enhancing the quality of civic participation, particularly among young people. This study aims to analyze the political education model implemented by the Indonesian Solidarity Party (PSI) in Wonosobo Regency and to assess its effectiveness in promoting youth political participation. The research employs a qualitative case study approach using in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that PSI has developed a participatory and contextual political education model by integrating offline and online strategies and positioning party cadres as key educational actors. This model contributes to improved political understanding, attitudinal change, and the early emergence of youth political participation, although it remains constrained by digital literacy gaps and limited cadre capacity. The study highlights the importance of sustainable and adaptive party-based political education in strengthening local democracy.

Keywords: political education, political parties, youth, PSI, political participation.

INTRODUCTION

Pendidikan politik merupakan elemen fundamental dalam pembangunan demokrasi karena berperan membentuk kesadaran, pengetahuan, serta orientasi partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, warga negara tidak hanya diperkenalkan pada sistem dan institusi politik, tetapi juga dibekali kemampuan kritis untuk memahami hak, kewajiban, serta dinamika kekuasaan yang berkembang (Widiyanto & Istiqomah, 2023). Dalam konteks demokrasi modern, pendidikan politik menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas isu politik dan derasnya arus informasi digital. Tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi politik berpotensi bersifat pasif,

* Sahrul Said, sahrulsaid2@gmail.com

manipulatif, atau sekadar prosedural. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dipahami sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan warga negara.

Partai politik memiliki posisi strategis sebagai institusi utama yang secara normatif dan konstitusional bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai sering kali bersifat insidental dan berorientasi elektoral, terutama menjelang pemilu (Schwikkard, 2022). Kondisi ini menyebabkan fungsi edukatif partai belum berjalan optimal dalam membangun kesadaran politik jangka panjang. Akibatnya, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung bersifat pragmatis dan tidak berakar pada pemahaman politik yang mendalam. Situasi ini menegaskan perlunya model pendidikan politik partai yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan relevan dengan konteks sosial masyarakat.

Generasi muda merupakan kelompok strategis dalam demokrasi karena memiliki potensi sebagai agen perubahan sekaligus penentu arah politik di masa depan. Namun demikian, tingkat partisipasi politik pemuda di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, serta rendahnya literasi politik (Lin & Wang, 2022). Perkembangan teknologi digital di satu sisi membuka ruang baru bagi keterlibatan politik pemuda, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko partisipasi dangkal dan disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemuda perlu dirancang secara adaptif dengan memadukan pendekatan konvensional dan digital agar mampu menjangkau kebutuhan serta karakter generasi muda.

Dalam konteks tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menarik untuk dikaji karena secara ideologis dan organisatoris memosisikan generasi muda sebagai basis utama gerakan politiknya. PSI mengusung pendekatan pendidikan politik yang menekankan partisipasi, keterbukaan, dan pemanfaatan media digital sebagai ruang pembelajaran politik. Kabupaten Wonosobo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki proporsi penduduk muda yang cukup signifikan serta

karakter sosial yang merepresentasikan wilayah non-metropolitan. Kondisi ini menjadikan Wonosobo sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana pendidikan politik partai dijalankan di tingkat lokal dan bagaimana respons pemuda terhadap model tersebut.

Sejauh ini, penelitian tentang pendidikan politik partai di Indonesia masih didominasi oleh kajian normatif dan berfokus pada peran partai secara umum, sementara studi empiris mengenai model pendidikan politik partai baru di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam model pendidikan politik PSI di Kabupaten Wonosobo serta efektivitasnya dalam mendorong partisipasi politik pemuda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian pendidikan politik partai dan kontribusi praktis bagi penguatan demokrasi lokal berbasis generasi muda.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam model pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Wonosobo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika pendidikan politik dalam konteks sosial-politik lokal yang spesifik (Sarosa, 2021). Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai strategi, praktik, serta pengalaman aktor yang terlibat dalam pendidikan politik partai. Dengan desain ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan interaksi sosial yang membentuk pendidikan politik tersebut. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tujuan penelitian yang bersifat analitis dan kontekstual.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus PSI tingkat daerah, kader partai, tokoh masyarakat, serta pemuda yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program pendidikan politik PSI.

Selain wawancara, observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pola interaksi antara kader dan pemuda. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap materi pendidikan politik, laporan kegiatan, serta dokumen resmi partai yang relevan (Abdullah et al., 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan model pendidikan politik dan partisipasi pemuda. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian (Sahir, 2021). Dengan prosedur ini, hasil penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wonosobo menempatkan kader sebagai aktor strategis dalam pendidikan politik sekaligus penguatan kelembagaan partai. Kader tidak diposisikan sekadar sebagai pelaksana administratif atau mesin elektoral, melainkan sebagai subjek politik yang memiliki peran edukatif, komunikatif, dan transformatif. Posisi ini menjadikan kader sebagai penghubung utama antara struktur partai dan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses pembelajaran politik yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut selaras dengan konsep pendidikan politik partisipatif yang menekankan pentingnya dialog, refleksi kritis, dan keterlibatan aktif warga negara. Dalam kerangka ini, kader PSI berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi politik secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses diskusi dan pengambilan makna atas realitas politik di tingkat lokal. Pendidikan politik dipahami sebagai proses sosial yang bersifat timbal balik, bukan sekadar transmisi ideologi partai.

Dalam praktiknya, kader PSI Kabupaten Wonosobo menjalankan peran fasilitator dialog publik melalui berbagai kegiatan sosial dan komunitas, seperti diskusi tematik, forum pemuda, serta pendampingan masyarakat desa. Aktivitas tersebut menjadi ruang pembelajaran politik informal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara partai dan masyarakat. Melalui mekanisme ini, aspirasi warga dapat diartikulasikan sekaligus dipertemukan dengan agenda dan nilai politik partai. Di sisi lain, peran kader juga mencakup fungsi penguatan kelembagaan partai. Kader berperan dalam proses konsolidasi organisasi melalui penguatan struktur kepengurusan, internalisasi nilai dan ideologi partai, serta peningkatan koordinasi antarlevel organisasi. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan politik tidak berjalan secara sporadis, melainkan terintegrasi dengan visi dan strategi jangka panjang partai.

Strategi pendidikan politik PSI di Wonosobo dirancang secara kontekstual dengan menjadikan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pemuda sebagai pintu masuk pembelajaran politik. Isu pendidikan, lapangan kerja, pengangguran, serta persoalan desa dipilih sebagai tema utama karena memiliki relevansi langsung dengan pengalaman sosial generasi muda. Pendekatan ini membuat politik tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang abstrak atau elitis, melainkan sebagai bagian dari realitas hidup yang dapat dipahami dan dipengaruhi.

Selain pendekatan kontekstual, PSI juga mengembangkan model pendidikan politik hibrid dengan mengintegrasikan strategi luring dan daring. Kegiatan tatap muka digunakan untuk membangun relasi sosial, kepercayaan politik, dan ikatan emosional antara kader dan masyarakat. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan sebagai ruang publik alternatif untuk menyebarluaskan informasi, membangun diskursus politik, dan menjaga interaksi secara berkelanjutan dengan kaum muda.

Model hibrid ini memberikan fleksibilitas partisipasi bagi pemuda yang memiliki keterbatasan waktu dan ruang. Media digital memungkinkan pendidikan politik menjangkau segmen pemuda yang sebelumnya kurang terlibat dalam aktivitas politik formal. Namun demikian, ruang digital juga menghadirkan

tantangan tersendiri terkait kualitas partisipasi dan kedalaman diskusi politik yang terjadi di dalamnya.

Tantangan utama dalam implementasi pendidikan politik hibrid adalah adanya kesenjangan akses dan literasi digital di kalangan pemuda. Tidak semua pemuda memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan media digital secara kritis. Akibatnya, pendidikan politik berbasis daring cenderung belum menjangkau seluruh segmen pemuda secara merata, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, kualitas diskusi politik di ruang digital sering kali bersifat dangkal dan reaktif. Keterbatasan kapasitas kader dalam pengelolaan konten dan moderasi diskusi juga memengaruhi konsistensi pesan politik yang disampaikan. Kondisi ini memunculkan risiko partisipasi semu, di mana keterlibatan pemuda hanya berhenti pada aktivitas simbolik seperti menyukai atau membagikan konten tanpa diikuti partisipasi substantif dalam proses politik. Meskipun demikian, efektivitas pendidikan politik PSI dapat dilihat melalui sejumlah indikator penting, yaitu peningkatan pemahaman politik, relevansi materi dengan realitas pemuda, penerimaan nilai politik secara dialogis, perubahan sikap dari apatis menjadi kritis, serta munculnya awal perubahan perilaku politik. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik PSI telah berkontribusi positif dalam membangun literasi dan kesadaran politik generasi muda, meskipun dampaknya masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan penguatan berkelanjutan.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wonosobo mengembangkan model pendidikan politik yang partisipatif, kontekstual, dan adaptif melalui integrasi strategi luring dan daring dengan menempatkan kader sebagai aktor edukatif utama. Model ini terbukti mampu meningkatkan literasi politik, membentuk sikap kritis, serta mendorong munculnya partisipasi politik awal di kalangan generasi muda, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh kesenjangan literasi digital, kapasitas kader, dan kecenderungan partisipasi simbolik di ruang digital. Oleh karena itu, disarankan agar partai politik mengembangkan pendidikan politik secara lebih sistematis dan

berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kader, konsistensi narasi ideologis, serta pengelolaan ruang digital yang edukatif dan dialogis. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian pendidikan politik partai di tingkat lokal, sementara secara praktis memberikan rujukan bagi partai politik dalam merancang strategi pemberdayaan politik pemuda yang lebih substansial dan berorientasi jangka panjang.

REFERENCE LIST

- Abdullah, Karimuddin, Jannah, Misbahul, Aiman, Ummul, et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Andersson, E. (2017). The pedagogical political participation model (3P-M) for exploring, explaining and affecting young people's political participation. *Journal of Youth Studies*, 20(10), 1346–1366. <https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1333585>
- Bakker, T. P., & de Vreese, C. H. (2011). Good news for the future? Young people, internet use, and political participation. *Journal of Youth Studies*, 14(5), 607–625. <https://doi.org/10.1080/13676261.2010.539276>
- Dalton, R. J. (2017). Political participation in advanced industrial democracies. *Government and Opposition*, 52(4), 590–622. <https://doi.org/10.1017/gov.2016.21>
- Hooghe, M., Stolle, D., & Stouthuysen, P. (2013). Are all critical citizens alike? Political participation patterns of youth. *Comparative Political Studies*, 46(6), 751–778. <https://doi.org/10.1177/0010414013487964>
- Lin, Hong., Wang, Shicheng. (2022). Metaverse In Education: Vision Opportunities And Challenges. *IEEE International Conference On Big Data*.
- Livingstone, S., Couldry, N., & Markham, T. (2018). Youthful participation: What have we learned, what next? *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(5), 283–297. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmw023>
- Norris, P. (2011). Democratic deficit: Critical citizens revisited. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>
- Oser, J., Hooghe, M., & Marien, S. (2013). Is online participation distinct from offline participation? *Political Research Quarterly*, 66(1), 91–101. <https://doi.org/10.1177/1065912912436695>
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia.

- Sarosa, Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sleman: Penerbit Pt Kanisius.
- Schwikkard, David Jeffery. (2022). Religion And Political Parties In South Africa: A Framework And Systematic Review. *Journal Of Southern African Studies*, 48, 1077—1097.
- Sloam, J. (2014). The outraged young: How young Europeans are reshaping the political landscape. *Political Insight*, 5(2), 4–7. <https://doi.org/10.1111/2041-9066.12066>
- Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2018). Political participation in a changing world. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315620708>
- Widiyanto, Delfina., Istiqomah, Annisa. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/Jp.V32i1.2826>
- Zamhari, Dwi Noviani., Zainuddin. (2023). Perkembangan Pendidikan Di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa Sastra Dan Budaya*, 1(5), 1-10.